

Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024

Vania Amanda¹⁾

¹⁾Universitas Gadjah Mada

corresponding authors: vaniaamanda@mail.ugm.ac.id

INFO ARTIKEL

Kata Kunci: IPM, Kemiskinan, Regresi Linier Sederhana, Jawa Tengah, Pembangunan Manusia

Keywords: HDI, Poverty, Simple Linear Regression, Central Java, Human Development



ABSTRAK

Kemiskinan masih menjadi tantangan utama dalam pembangunan daerah, termasuk di Provinsi Jawa Tengah. Salah satu faktor penting yang diyakini dapat menekan angka kemiskinan adalah peningkatan kualitas manusia melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana IPM memengaruhi tingkat kemiskinan di kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2024. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kuantitatif menggunakan metode regresi linier sederhana, dengan IPM sebagai variabel bebas dan tingkat kemiskinan sebagai variabel terikat. Data penelitian bersumber dari publikasi resmi Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah tahun 2024 yang mencakup 35 kabupaten/kota. Proses analisis dilakukan menggunakan perangkat lunak STATA 17 melalui serangkaian uji asumsi klasik (normalitas, heteroskedastisitas, dan linearitas) sebelum dilakukan pengujian regresi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa IPM memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Artinya, wilayah dengan capaian IPM yang lebih tinggi cenderung memiliki tingkat kemiskinan yang lebih rendah. Nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,4859 menandakan bahwa sekitar 48,59% variasi kemiskinan dapat dijelaskan oleh IPM, sedangkan sisanya dipengaruhi faktor lain di luar model. Temuan ini memperlihatkan pentingnya peningkatan IPM sebagai strategi pembangunan yang berkelanjutan dalam upaya pengentasan kemiskinan.

ABSTRACT

Poverty remains a major challenge in regional development, including in Central Java Province. One important factor believed to reduce poverty is the improvement of human quality as reflected in the Human Development Index (HDI). This study aims to analyze the effect of HDI on poverty levels across districts and municipalities in Central Java in 2024. The study employs a quantitative approach using a simple linear regression method, with HDI as the independent variable and poverty level as the dependent variable. The data are secondary data obtained from official publications of the Central Java Provincial Statistics Office covering thirty five districts and municipalities. Data Analysis was conducted using STATA 17 through classical assumption test, including normality, heteroskedasticity, and linearity test, prior to regression estimation. The results indicate that HDI has a negative and statistically significant effect on poverty levels. Regions with higher HDI tend to experience lower poverty rates.

PENDAHULUAN

Kemiskinan masih menjadi salah satu permasalahan mendasar dalam pembangunan di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat belum sepenuhnya mampu mengurangi ketimpangan kesejahteraan masyarakat (Sari, 2021). Di beberapa daerah, peningkatan pendapatan belum diiringi dengan perbaikan kualitas hidup yang merata. Masalah kemiskinan bukan hanya berkaitan dengan rendahnya pendapatan, tetapi juga menyangkut keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan sarana kehidupan yang layak (Maharani *et al.*, 2024). Pembangunan yang ideal tidak hanya berfokus pada peningkatan ekonomi semata, melainkan juga pada pembangunan manusia secara menyeluruh yang mencakup kemampuan untuk hidup sehat, berpendidikan, dan memiliki standar hidup layak (Susanto, 2024).

Indeks Pembangunan Manusia atau IPM merupakan salah satu indikator penting dalam menilai keberhasilan pembangunan manusia di suatu wilayah. IPM menggambarkan bagaimana upaya pembangunan berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui tiga aspek utama, yaitu kesehatan, pendidikan, dan standar hidup (Izzah & Hendarti, 2021). Semakin tinggi IPM suatu wilayah, maka semakin baik pula kualitas hidup masyarakat di wilayah tersebut. Peningkatan IPM diharapkan mampu menekan tingkat kemiskinan karena masyarakat yang memiliki pendidikan lebih baik dan kondisi kesehatan yang lebih baik cenderung memiliki produktivitas dan peluang ekonomi yang bisa menjadi lebih tinggi (Rodiyah *et al.*, 2025).

Kenyataannya, peningkatan IPM tidak selalu berbanding lurus dengan penurunan angka kemiskinan. Ada wilayah yang menunjukkan kenaikan IPM setiap tahun, tetapi tingkat kemiskinan masih tergolong tinggi. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara hasil pembangunan manusia dan pencapaian kesejahteraan masyarakat (Hakim, 2024). Beberapa faktor seperti kesempatan kerja, pertumbuhan ekonomi, dan pemerataan pembangunan diduga turut memengaruhi hubungan IPM dan kemiskinan (Munaa, 2025). Kondisi tersebut menjadi dasar penting untuk dilakukan analisis yang lebih mendalam mengenai pengaruh IPM terhadap tingkat kemiskinan (Tirta & Putri, 2025).

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap tingkat kemiskinan di wilayah yang diteliti. Penelitian ini juga berupaya menjawab pertanyaan apakah peningkatan IPM benar-benar memberikan dampak nyata terhadap penurunan tingkat kemiskinan. Selain itu, penelitian ini ingin mengetahui sejauh mana perbedaan tingkat pembangunan manusia dapat menjelaskan variasi tingkat kemiskinan antarwilayah (Dewi *et al.*, 2025).

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap tingkat kemiskinan, memahami hubungan antara peningkatan kualitas manusia dengan kesejahteraan masyarakat, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh IPM terhadap kemiskinan. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran empiris mengenai pentingnya pembangunan manusia sebagai dasar dalam mengurangi kemiskinan. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam merancang kebijakan pembangunan yang lebih efektif dan berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat (Akbar *et al.*, 2023).

Penelitian ini berlandaskan pada konsep pembangunan manusia yang menekankan pentingnya peningkatan kemampuan individu dalam berbagai aspek kehidupan (Bangun *et al.*, 2024). Pembangunan manusia dianggap sebagai tujuan utama pembangunan yang sesungguhnya karena melibatkan perluasan kesempatan masyarakat untuk menikmati kehidupan yang lebih baik. Dalam hal ini, IPM berperan sebagai ukuran utama keberhasilan pembangunan manusia. Selain itu, teori modal manusia juga menjadi acuan yang menjelaskan bahwa peningkatan pendidikan dan kesehatan merupakan investasi

jangka panjang yang dapat meningkatkan produktivitas dan menurunkan kemiskinan. Dengan pemahaman tersebut, pembangunan manusia yang baik diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan menurunkan tingkat kemiskinan secara berkelanjutan (Pellu, 2024).

Kebaruan penelitian ini terletak pada penggunaan data terbaru tahun 2024 dengan cakupan seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah untuk menganalisis pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap tingkat kemiskinan. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang umumnya menggunakan data sebelum tahun 2023, mengombinasikan Indeks Pembangunan Manusia dengan berbagai variabel makroekonomi lainnya, atau menerapkan model analisis yang kompleks, penelitian ini secara khusus memfokuskan pada pengaruh langsung Indeks Pembangunan Manusia sebagai satu-satunya variabel independen dengan menggunakan metode regresi linier sederhana. Pendekatan ini memungkinkan pengukuran hubungan yang lebih jelas dan terfokus antara pembangunan manusia dan tingkat kemiskinan tanpa adanya bias interaksi antarvariabel. Selain itu, penggunaan data lintas wilayah pada seluruh kabupaten dan kota di Jawa Tengah memberikan gambaran empiris yang komprehensif mengenai variasi pembangunan manusia dan kemiskinan di tingkat daerah. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi empiris yang memperbarui literatur pembangunan manusia serta menegaskan peran Indeks Pembangunan Manusia sebagai instrumen strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan yang berkelanjutan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis regresi linier sederhana. Pendekatan kuantitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk mengukur hubungan antara variabel secara numerik dan menguji hipotesis yang telah dirumuskan secara statistik. Analisis regresi linier sederhana digunakan untuk mengetahui dan mengukur pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2024.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder dipilih karena penelitian ini tidak melakukan pengumpulan data secara langsung di lapangan, melainkan menggunakan data yang telah tersedia dan dipublikasikan oleh lembaga resmi. Data diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah tahun 2024. Unit analisis dalam penelitian ini adalah seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah, sehingga cakupan penelitian bersifat menyeluruh terhadap wilayah administratif provinsi. Adapun tabulasi data yang telah disusun adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Tabulasi Data

No	Kabupaten/Kota	IPM	Tingkat Kemiskinan
1	Kabupaten Cilacap	72,38	10,68
2	Kabupaten Banyumas	74,52	11,95
3	Kabupaten Purbalingga	70,69	14,18
4	Kabupaten Banjarnegara	69,6	14,71
5	Kabupaten Kebumen	71,93	15,71
6	Kabupaten Purworejo	75,11	10,87
7	Kabupaten Wonosobo	69,82	15,28
8	Kabupaten Magelang	71,99	10,83
9	Kabupaten Boyolali	75,96	9,63
10	Kabupaten Klaten	78,16	12,04
11	Kabupaten Sukoharjo	79,3	7,47
12	Kabupaten Wonogiri	72,55	10,71

13	Kabupaten Karanganyar	78,11	9,59
14	Kabupaten Sragen	75,53	12,41
15	Kabupaten Grobogan	72,02	11,43
16	Kabupaten Blora	71,39	11,42
17	Kabupaten Rembang	72,53	14,02
18	Kabupaten Pati	74,1	9,17
19	Kabupaten Kudus	77,22	7,23
20	Kabupaten Jepara	74,32	6,09
21	Kabupaten Demak	74,57	11,89
22	Kabupaten Semarang	75,67	6,96
23	Kabupaten Temanggung	71,87	8,67
24	Kabupaten Kendal	74,34	9,35
25	Kabupaten Batang	70,74	8,73
26	Kabupaten Pekalongan	71,84	8,95
27	Kabupaten Pemalang	68,55	14,92
28	Kabupaten Tegal	70,77	6,81
29	Kabupaten Brebes	68,46	15,6
30	Kota Magelang	82,15	5,94
31	Kota Surakarta	84,4	8,31
32	Kota Salatiga	85,72	4,57
33	Kota Semarang	85,25	4,03
34	Kota Pekalongan	77,22	6,71
35	Kota Tegal	77,43	7,64

Sumber: BPS Jawa Tengah, 2024

Analisis data dilakukan dengan menggunakan regresi linier sederhana, di mana IPM berperan sebagai variabel independen, sedangkan tingkat kemiskinan merupakan variabel dependen. Model ini dipilih karena hanya terdapat satu variabel bebas yang diduga memengaruhi satu variabel terikat, sehingga metode regresi linier sederhana merupakan pendekatan yang paling tepat. Pengolahan data dilakukan dengan bantuan software STATA 17, yang mendukung analisis statistik dengan hasil estimasi yang akurat dan terstandarisasi.

Sebelum dilakukan estimasi model regresi, terdapat beberapa tahapan analisis data yang dilakukan untuk memastikan validitas dan reliabilitas model. Pertama, dilakukan uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas untuk memastikan distribusi residual normal, uji heteroskedastisitas untuk menguji kesamaan varians residual, serta uji linearitas untuk memastikan hubungan antara variabel bebas dan terikat bersifat linear.

Setelah model dinyatakan memenuhi asumsi klasik, dilakukan estimasi regresi linier sederhana untuk memperoleh nilai konstanta, koefisien regresi, serta menguji signifikansi pengaruh IPM terhadap tingkat kemiskinan. Selanjutnya, dilakukan uji t untuk mengetahui pengaruh variabel IPM terhadap kemiskinan secara parsial, dan uji koefisien determinasi (R^2) untuk melihat seberapa besar proporsi variasi tingkat kemiskinan yang dapat dijelaskan oleh IPM. Hasil dari tahapan-tahapan tersebut kemudian digunakan sebagai dasar dalam penarikan kesimpulan dan pembahasan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Data Penelitian

Data penelitian ini mencakup 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2024. Variabel yang digunakan terdiri dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai variabel independen dan tingkat kemiskinan sebagai variabel dependen. Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran umum mengenai karakteristik data dari kedua variabel tersebut. Hasil uji statistik deskriptif kedua variabel adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Hasil Statistik Deskriptif

Variabel	N	Mean	Std. Dev.	Min	Max
IPM	35	74.749	4.502	68.46	85.72
Kemiskinan	35	10.129	3.211	4.03	15.71

Sumber: Hasil Pengolahan Data

Berdasarkan Tabel 2, rata-rata nilai IPM di Provinsi Jawa Tengah tahun 2024 sebesar 74,749 dengan standar deviasi 4,502, nilai minimum 68,46, dan nilai maksimum 85,72. Nilai IPM tertinggi terdapat di Kota Salatiga sebesar 85,72, sedangkan nilai terendah terdapat di Kabupaten Brebes sebesar 68,46.

Sementara itu, tingkat kemiskinan memiliki rata-rata sebesar 10,129 persen dengan standar deviasi 3,211, nilai minimum 4,03 persen, dan nilai maksimum 15,71 persen. Tingkat kemiskinan tertinggi tercatat di Kabupaten Kebumen sebesar 15,71 persen, sedangkan yang terendah berada di Kota Semarang sebesar 4,03 persen.

Hasil ini menunjukkan bahwa terdapat variasi yang cukup lebar antara daerah dengan IPM tinggi dan rendah, begitu pula dengan tingkat kemiskinan. Perbedaan ini memberikan gambaran awal mengenai adanya kemungkinan hubungan antara IPM dan tingkat kemiskinan di Jawa Tengah.

Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah residual dalam model regresi berdistribusi normal sebagai salah satu asumsi penting dalam metode Ordinary Least Squares (OLS). Normalitas residual diperlukan agar pengujian statistik, seperti uji t dan uji F, menghasilkan kesimpulan yang valid (Gujarati & Porter, 2009). Dalam penelitian ini, uji normalitas dilakukan menggunakan uji Shapiro–Wilk karena memiliki tingkat kepekaan yang tinggi untuk ukuran sampel yang relatif kecil (Ghasemi & Zahediasl, 2012). Kriteria pengujian didasarkan pada nilai probabilitas (p-value), di mana nilai p-value lebih besar dari taraf signifikansi 5 persen menunjukkan bahwa residual berdistribusi normal.

Tabel 3. Hasil Uji Normalitas

Variabel	Obs	W	Prob > z
res	35	0,977	0,665

Sumber: Hasil Pengolahan Data

Hasil pengujian normalitas menggunakan uji Shapiro–Wilk menunjukkan nilai statistik W sebesar 0,977 dengan nilai probabilitas (p-value) sebesar 0,665. Nilai p-value tersebut lebih besar dari taraf signifikansi 5 persen (0,05), sehingga hipotesis nol yang menyatakan bahwa residual berdistribusi normal tidak dapat ditolak. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa residual dalam model regresi memiliki distribusi normal. Terpenuhinya asumsi normalitas ini menunjukkan bahwa model regresi layak digunakan

dan hasil pengujian statistik, khususnya uji t dan uji F, dapat diinterpretasikan secara valid dan reliabel.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya ketidaksamaan varians residual pada setiap pengamatan dalam model regresi. Asumsi homoskedastisitas mengharuskan varians residual bersifat konstan, karena pelanggaran terhadap asumsi ini dapat menyebabkan estimasi koefisien regresi menjadi tidak efisien dan mengakibatkan standar error tidak akurat. Dalam penelitian ini, pengujian heteroskedastisitas dilakukan menggunakan uji Glejser, yaitu dengan meregresikan nilai absolut residual terhadap variabel independen. Kriteria pengujian didasarkan pada nilai probabilitas (p-value), di mana apabila nilai p-value lebih besar dari taraf signifikansi 5 persen, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala heteroskedastisitas dalam model regresi. Sebaliknya, apabila nilai p-value lebih kecil dari 5 persen, maka model regresi dinyatakan mengandung heteroskedastisitas.

Tabel 4. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Coef.	Std. Error	t	P> t
IPM	-0.031	0.018	-1.71	0.099
_cons	22.395	13.036	1.72	0.096

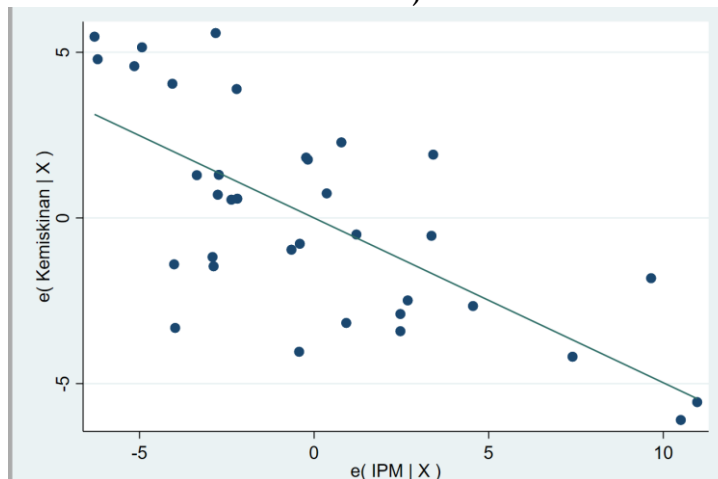
Sumber: Hasil Pengolahan Data

Hasil pengujian heteroskedastisitas menggunakan uji Glejser menunjukkan bahwa nilai probabilitas (p-value) untuk variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 0,099. Nilai tersebut lebih besar dari taraf signifikansi 5 persen (0,05), sehingga hipotesis nol yang menyatakan tidak adanya heteroskedastisitas dalam model regresi tidak dapat ditolak. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala heteroskedastisitas pada model regresi yang digunakan. Terpenuhinya asumsi homoskedastisitas menunjukkan bahwa varians residual bersifat konstan dan estimasi koefisien regresi yang dihasilkan bersifat efisien, sehingga hasil pengujian statistik dapat diinterpretasikan secara valid dan reliabel.

Uji Linearitas

Uji linearitas dilakukan untuk memastikan bahwa hubungan antara variabel independen, yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan variabel dependen, yaitu tingkat kemiskinan, bersifat linear. Asumsi linearitas merupakan syarat penting dalam model regresi linier karena pelanggaran terhadap asumsi ini dapat menyebabkan hasil estimasi menjadi bias dan sulit diinterpretasikan. Dalam penelitian ini, pengujian linearitas dilakukan secara visual melalui analisis scatter plot antara IPM dan tingkat kemiskinan. Hubungan antar variabel dinyatakan linear apabila titik-titik data membentuk pola yang mendekati garis lurus dan menunjukkan arah hubungan yang konsisten, baik meningkat maupun menurun. Sebaliknya, apabila pola data membentuk lengkungan atau pola acak, maka hubungan antar variabel dinyatakan tidak linear. Dengan demikian, hasil uji linearitas digunakan untuk menilai kelayakan penggunaan model regresi linier sederhana dalam penelitian ini

Gambar 1. Hasil Uji Linearitas



Sumber: Hasil Pengolahan Data

Hasil pengujian linearitas melalui analisis scatter plot menunjukkan bahwa sebaran titik data antara variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan tingkat kemiskinan membentuk pola yang menyerupai garis lurus dengan arah menurun dari kiri ke kanan. Pola tersebut mengindikasikan adanya hubungan linear yang bersifat negatif, di mana peningkatan nilai IPM cenderung diikuti oleh penurunan tingkat kemiskinan. Tidak ditemukan pola melengkung atau penyimpangan yang signifikan dari garis lurus, sehingga hubungan antara kedua variabel dapat dikatakan linear. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa asumsi linearitas dalam model regresi linier sederhana telah terpenuhi, dan model regresi yang digunakan layak untuk menganalisis pengaruh IPM terhadap tingkat kemiskinan.

Analisis Regresi Linear Sederhana

Analisis regresi linier sederhana digunakan untuk menguji dan mengukur pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah tahun 2024. Metode ini dipilih karena penelitian hanya melibatkan satu variabel independen, yaitu IPM, yang diduga memiliki pengaruh terhadap satu variabel dependen, yakni tingkat kemiskinan.

Tabel 5. Hasil Analisis Regresi

Variabel	Coef.	Std. Error	t	P> t
IPM	-0.4970	0.0889	-5.59	0.000
_cons	44.3328	6.4765	6.84	0.000
R - squared = 0,4859				

Sumber: Hasil Pengolahan Data

Berdasarkan tabel di atas, persamaan regresi yang terbentuk adalah sebagai berikut:

$$Y = 44,3328 - 0,4970X$$

Keterangan:

Y = Tingkat kemiskinan

X = Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Nilai konstanta sebesar 44,3328 menunjukkan bahwa apabila Indeks Pembangunan Manusia (IPM) diasumsikan konstan atau berada pada nilai nol, maka tingkat kemiskinan diperkirakan sebesar 44,33 persen. Meskipun kondisi tersebut bersifat hipotetis dan tidak mungkin terjadi dalam praktik, nilai konstanta ini berfungsi sebagai titik awal (baseline) untuk menggambarkan tingkat kemiskinan sebelum dipengaruhi oleh perubahan IPM. Selanjutnya, koefisien regresi IPM sebesar $-0,4970$ menunjukkan bahwa setiap peningkatan IPM sebesar satu poin akan diikuti oleh penurunan tingkat kemiskinan sebesar 0,497 persen, dengan asumsi faktor-faktor lain di luar model dianggap tetap. Besaran koefisien tersebut mencerminkan sensitivitas tingkat kemiskinan terhadap perubahan IPM, sehingga peningkatan kualitas pembangunan manusia memiliki dampak yang cukup signifikan dalam menekan kemiskinan. Tanda negatif pada koefisien regresi mengindikasikan adanya hubungan yang berlawanan arah antara IPM dan tingkat kemiskinan, yang berarti semakin tinggi capaian pembangunan manusia, maka semakin rendah tingkat kemiskinan yang terjadi. Hubungan ini menunjukkan bahwa perbaikan dalam dimensi pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak yang tercermin dalam IPM mampu meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat. Secara keseluruhan, persamaan regresi yang dihasilkan menegaskan bahwa pembangunan manusia melalui peningkatan IPM merupakan faktor strategis dalam upaya pengurangan kemiskinan di kabupaten dan kota Provinsi Jawa Tengah, serta menjadi landasan penting bagi perumusan kebijakan pembangunan daerah yang berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Uji t

Hasil pengujian hipotesis secara parsial menggunakan uji t menunjukkan bahwa variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memiliki nilai t hitung sebesar $-5,59$ dengan nilai probabilitas (p-value) sebesar 0,000. Nilai p-value tersebut lebih kecil dari taraf signifikansi 5 persen (0,05), sehingga hipotesis nol yang menyatakan bahwa IPM tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan dapat ditolak. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa IPM berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah. Selain itu, tanda negatif pada nilai t hitung dan koefisien regresi IPM menunjukkan bahwa pengaruh yang ditimbulkan bersifat negatif, yang berarti bahwa peningkatan nilai IPM akan diikuti oleh penurunan tingkat kemiskinan. Temuan ini mengindikasikan bahwa perbaikan kualitas pembangunan manusia yang tercermin melalui peningkatan aspek pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak mampu meningkatkan produktivitas serta kesejahteraan masyarakat, sehingga berkontribusi dalam menekan angka kemiskinan. Secara empiris, hasil uji t ini memperkuat argumen bahwa pembangunan manusia memiliki peranan penting dan signifikan dalam upaya pengentasan kemiskinan di tingkat daerah, khususnya di kabupaten dan kota Provinsi Jawa Tengah.

Koefisien Determinasi (R^2)

Nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,4859 menunjukkan bahwa sebesar 48,59 persen variasi tingkat kemiskinan di kabupaten dan kota Provinsi Jawa Tengah dapat dijelaskan oleh variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dalam model regresi yang digunakan. Hal ini mengindikasikan bahwa IPM memiliki kontribusi yang cukup besar dalam menjelaskan perbedaan tingkat kemiskinan antarwilayah, meskipun model hanya menggunakan satu variabel independen. Sementara itu, sebesar 51,41 persen variasi tingkat kemiskinan dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan ke dalam model penelitian. Nilai R^2 yang mendekati 0,5 ini menunjukkan bahwa model memiliki daya jelaskan yang moderat dan relevan untuk fenomena sosial-ekonomi yang bersifat kompleks

seperti kemiskinan. Dengan demikian, hasil ini menegaskan bahwa peningkatan kualitas pembangunan manusia yang tercermin melalui IPM merupakan salah satu faktor penting dalam menurunkan tingkat kemiskinan, meskipun upaya pengentasan kemiskinan tetap memerlukan pendekatan kebijakan yang komprehensif dan multidimensi.

Pembahasan

Hasil analisis menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah, di mana koefisien regresi sebesar $-0,497$ mengindikasikan bahwa setiap peningkatan IPM sebesar satu poin akan menurunkan tingkat kemiskinan sebesar hampir setengah persen, dengan asumsi faktor lain dianggap konstan. Temuan ini menegaskan bahwa peningkatan kualitas pendidikan, derajat kesehatan, dan daya beli masyarakat yang tercermin dalam IPM berperan penting dalam meningkatkan produktivitas dan kapasitas ekonomi masyarakat, sehingga mampu mendorong penurunan kemiskinan secara berkelanjutan. Nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 48,59 persen menunjukkan bahwa hampir setengah variasi tingkat kemiskinan antarwilayah di Jawa Tengah dapat dijelaskan oleh variasi IPM, meskipun model yang digunakan hanya melibatkan satu variabel independen. Sementara itu, sisa variasi kemiskinan dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar model, seperti ketimpangan distribusi pendapatan, keterbatasan kesempatan kerja, struktur ekonomi daerah, serta efektivitas kebijakan pembangunan yang diterapkan.

Berdasarkan data penelitian, wilayah perkotaan di Provinsi Jawa Tengah cenderung memiliki capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang lebih tinggi disertai dengan tingkat kemiskinan yang relatif rendah. Kota Semarang, sebagai pusat pemerintahan dan aktivitas ekonomi, mencatat IPM sebesar 85,25 dengan tingkat kemiskinan hanya 4,03 persen, yang menunjukkan kondisi pembangunan manusia dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik dibandingkan wilayah lainnya. Pola serupa juga terlihat di Kota Salatiga dan Kota Magelang yang memiliki IPM di atas 82 dengan tingkat kemiskinan di bawah 6 persen. Kondisi tersebut mencerminkan bahwa kota-kota besar di Jawa Tengah memiliki keunggulan dalam akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan yang lebih memadai, infrastruktur ekonomi yang lebih berkembang, serta ketersediaan lapangan kerja yang lebih beragam. Kemudahan akses ini mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia dan produktivitas ekonomi masyarakat, sehingga mampu menciptakan tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi dan menekan angka kemiskinan secara signifikan.

Sebaliknya, wilayah dengan capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang relatif rendah cenderung diikuti oleh tingkat kemiskinan yang lebih tinggi. Kabupaten Brebes dan Kabupaten Pemalang merupakan contoh daerah dengan nilai IPM di bawah 70 dan tingkat kemiskinan yang melebihi 14 persen. Kondisi tersebut mencerminkan masih adanya ketimpangan pembangunan antarwilayah di Provinsi Jawa Tengah. Daerah-daerah ini umumnya menghadapi keterbatasan infrastruktur dasar, rendahnya akses masyarakat terhadap pendidikan yang berkualitas, serta terbatasnya ketersediaan dan mutu layanan kesehatan. Selain itu, ketergantungan yang tinggi terhadap sektor pertanian tradisional menyebabkan perekonomian daerah menjadi rentan terhadap fluktuasi cuaca dan harga komoditas, sehingga pendapatan masyarakat cenderung tidak stabil. Kombinasi faktor-faktor tersebut menghambat peningkatan kualitas sumber daya manusia dan menyebabkan proses peningkatan IPM berjalan lebih lambat dibandingkan dengan wilayah lain yang memiliki struktur ekonomi dan akses pembangunan yang lebih baik.

Kabupaten Banjarnegara, Kebumen, dan Wonosobo juga menunjukkan pola yang serupa, dengan nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berada pada kisaran 69 hingga 72 serta tingkat kemiskinan yang masih berada di atas 14 persen. Ketiga kabupaten tersebut secara geografis berada di wilayah pegunungan yang memiliki keterbatasan akses

transportasi dan relatif minim peluang pengembangan kegiatan ekonomi nonpertanian. Kondisi geografis yang sulit dijangkau menyebabkan distribusi fasilitas pendidikan dan layanan kesehatan belum merata, baik dari sisi ketersediaan maupun kualitas pelayanan, sehingga berdampak langsung pada rendahnya kualitas hidup masyarakat. Keterbatasan tersebut turut menghambat peningkatan produktivitas dan kesempatan kerja masyarakat di luar sektor pertanian tradisional. Oleh karena itu, upaya peningkatan IPM di wilayah-wilayah ini memerlukan strategi pembangunan yang bersifat afirmatif dan berbasis kewilayahan, khususnya melalui perluasan akses pendidikan menengah, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dasar, serta penguatan konektivitas dan infrastruktur pendukung agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara lebih merata.

Sementara itu, Kabupaten dengan capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada kategori menengah, seperti Boyolali, Karanganyar, dan Pati, menunjukkan kinerja yang relatif baik dengan tingkat kemiskinan yang berada di bawah 10 persen. Kabupaten Boyolali mencatat IPM sebesar 75,96 dengan tingkat kemiskinan 9,63 persen, sedangkan Kabupaten Karanganyar memiliki IPM 78,11 dengan tingkat kemiskinan 9,59 persen, yang mengindikasikan bahwa investasi berkelanjutan pada sektor pendidikan dan pengembangan industri lokal mampu memberikan dampak positif dalam menekan kemiskinan. Stabilitas pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah ini juga ditopang oleh berkembangnya sektor industri pengolahan dan pariwisata yang menciptakan lapangan kerja serta meningkatkan pendapatan masyarakat. Sementara itu, kabupaten dengan IPM tinggi seperti Kudus, Jepara, dan Sukoharjo menunjukkan capaian yang lebih menonjol dalam pengentasan kemiskinan. Kabupaten Kudus mencatat IPM sebesar 77,22 dengan tingkat kemiskinan hanya 7,23 persen, Kabupaten Jepara memiliki IPM 74,32 dengan kemiskinan 6,09 persen, dan Kabupaten Sukoharjo mencatat IPM tertinggi di antara kabupaten lainnya, yaitu 79,30 dengan tingkat kemiskinan 7,47 persen. Keberhasilan daerah-daerah tersebut tidak terlepas dari pesatnya perkembangan sektor industri dan perdagangan, serta dukungan kebijakan pemerintah daerah yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan tenaga kerja melalui pelatihan keterampilan dan penguatan ekonomi kreatif, sehingga menunjukkan bahwa peningkatan IPM melalui penguatan sektor-sektor produktif memberikan dampak langsung terhadap penurunan tingkat kemiskinan.

Berdasarkan hasil pengujian statistik, diketahui bahwa data penelitian memenuhi asumsi klasik regresi, ditunjukkan oleh distribusi residual yang normal serta tidak ditemukannya gejala heteroskedastisitas, sehingga model regresi yang digunakan dinyatakan layak dan dapat diandalkan untuk analisis lebih lanjut. Selain itu, hasil pengujian linearitas menunjukkan bahwa hubungan antara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan tingkat kemiskinan bersifat linear dan berarah negatif, yang berarti peningkatan IPM secara konsisten diikuti oleh penurunan tingkat kemiskinan. Temuan ini memperkuat kerangka teori pembangunan manusia yang menempatkan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai fondasi utama dalam menciptakan kesejahteraan ekonomi yang berkelanjutan. Oleh karena itu, upaya peningkatan IPM tidak dapat hanya difokuskan pada aspek pendidikan semata, tetapi juga harus mencakup perluasan akses dan peningkatan kualitas layanan kesehatan, serta penciptaan lapangan kerja yang produktif dan berkelanjutan agar peningkatan kualitas manusia dapat diterjemahkan secara nyata ke dalam peningkatan kesejahteraan dan penurunan kemiskinan.

Kondisi ini menegaskan bahwa peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang mencakup perbaikan pada aspek pendidikan, kesehatan, dan pendapatan masyarakat, memiliki peranan yang sangat penting dalam menurunkan tingkat kemiskinan di suatu daerah. Semakin tinggi capaian IPM, semakin besar pula kemampuan masyarakat untuk mengakses pendidikan yang berkualitas, memperoleh pekerjaan yang layak, serta

meningkatkan produktivitas dan pendapatan ekonomi rumah tangga. Peningkatan kapasitas tersebut memungkinkan masyarakat untuk keluar dari jerat kemiskinan secara lebih mandiri dan berkelanjutan. Temuan ini menunjukkan bahwa pembangunan manusia tidak hanya berfungsi sebagai indikator kesejahteraan sosial, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam kebijakan pembangunan ekonomi yang bertujuan menekan kemiskinan secara struktural dan jangka panjang melalui penguatan kualitas sumber daya manusia.

Temuan penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Lailan Syafrina Hasibuan (2023) yang menyatakan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. Peningkatan IPM yang mencerminkan perbaikan kualitas hidup masyarakat terbukti mampu menekan kemiskinan, karena masyarakat dengan tingkat pendidikan dan keterampilan yang lebih tinggi memiliki kemampuan yang lebih baik dalam beradaptasi terhadap dinamika dan perubahan struktur ekonomi. Selain itu, peningkatan derajat kesehatan masyarakat memungkinkan peningkatan produktivitas tenaga kerja, sehingga individu dapat berpartisipasi secara lebih optimal dalam kegiatan ekonomi dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Temuan Hasibuan (2023) menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan manusia menciptakan suatu siklus positif, di mana peningkatan kualitas sumber daya manusia mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, yang pada akhirnya berdampak pada penurunan tingkat kemiskinan secara signifikan.

Keterkaitan antara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan penurunan tingkat kemiskinan juga diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh Aulia dan Asiyah (2022), yang menemukan bahwa IPM memiliki pengaruh signifikan terhadap pengurangan kemiskinan di Provinsi Jawa Timur. Mereka menjelaskan bahwa peningkatan IPM tidak hanya berkontribusi pada perbaikan kualitas sumber daya manusia, tetapi juga memperluas kesempatan kerja karena masyarakat dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi dan kondisi kesehatan yang lebih baik memiliki kesiapan yang lebih besar dalam menghadapi tuntutan dan dinamika pasar tenaga kerja. Kondisi tersebut memungkinkan masyarakat untuk memperoleh pendapatan yang lebih layak dan stabil, sehingga mampu memperbaiki kondisi sosial-ekonominya secara berkelanjutan. Penelitian ini menegaskan pentingnya sinkronisasi antara kebijakan pendidikan dan kesehatan dengan kebijakan ekonomi daerah, agar peningkatan IPM dapat diterjemahkan secara efektif menjadi penurunan tingkat kemiskinan di tingkat regional.

Namun, hasil penelitian ini berbeda dengan temuan Lestari dan Imaningsih (2022) yang menunjukkan bahwa IPM tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Mereka berpendapat bahwa di beberapa daerah, peningkatan IPM tidak diikuti oleh pemerataan ekonomi dan kesempatan kerja yang proporsional. Meskipun indikator pendidikan dan kesehatan meningkat, masyarakat belum tentu mampu memanfaatkan peningkatan tersebut untuk keluar dari kemiskinan akibat rendahnya daya serap tenaga kerja dan lemahnya sektor produktif lokal. Perbedaan ini memperlihatkan bahwa tingginya IPM tidak selalu menjadi jaminan penurunan kemiskinan apabila tidak diiringi dengan kebijakan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berbasis pemerataan.

Perbedaan hasil antar penelitian menunjukkan bahwa hubungan antara IPM dan kemiskinan bersifat kontekstual dan sangat dipengaruhi oleh faktor struktural, seperti efektivitas kebijakan pemerintah daerah, ketersediaan lapangan kerja, dan ketimpangan distribusi pembangunan. Daerah dengan infrastruktur pendidikan dan kesehatan yang baik akan lebih mudah merasakan dampak positif peningkatan IPM terhadap pengurangan kemiskinan. Sebaliknya, di daerah dengan akses yang terbatas terhadap pendidikan berkualitas dan layanan kesehatan memadai, peningkatan IPM sering kali tidak cukup untuk mengatasi masalah kemiskinan secara menyeluruh.

Hasil ini mengindikasikan bahwa pembangunan manusia harus ditempatkan sebagai bagian integral dari kebijakan ekonomi makro. Peningkatan IPM akan efektif menurunkan kemiskinan jika diimbangi dengan pemerataan pembangunan antarwilayah, pemberdayaan masyarakat miskin, dan penciptaan lapangan kerja yang produktif. Kualitas sumber daya manusia yang meningkat tanpa dukungan lapangan kerja yang memadai justru dapat menimbulkan ketimpangan baru antara kelompok masyarakat yang memiliki akses terhadap peluang ekonomi dan yang tidak.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh IPM terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Tengah bersifat kuat dan konsisten di berbagai wilayah, meskipun dengan variasi antar daerah. Kota dan kabupaten dengan IPM tinggi berhasil menekan kemiskinan melalui penguatan ekonomi dan pelayanan publik yang baik, sementara daerah dengan IPM rendah masih bergelut dengan keterbatasan sumber daya dan akses. Oleh karena itu, peningkatan IPM perlu diarahkan secara merata melalui kebijakan pembangunan berbasis wilayah, agar seluruh masyarakat Jawa Tengah dapat menikmati hasil pembangunan secara berkeadilan dan berkelanjutan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, penelitian ini menyimpulkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di kabupaten dan kota Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2024. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan kualitas pembangunan manusia yang tercermin melalui perbaikan aspek pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak memiliki peranan penting dalam menurunkan tingkat kemiskinan, serta mampu menjelaskan variasi kemiskinan secara cukup baik melalui model regresi yang digunakan. Oleh karena itu, IPM dapat dipandang sebagai salah satu indikator strategis dalam perumusan dan evaluasi kebijakan pengentasan kemiskinan di tingkat daerah. Implikasi dari hasil penelitian ini menegaskan pentingnya kebijakan pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia secara berkelanjutan dan merata antarwilayah, sehingga pemerintah daerah diharapkan tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga memperkuat akses pendidikan, pelayanan kesehatan, dan penciptaan lapangan kerja yang produktif, khususnya di wilayah dengan capaian IPM yang relatif rendah. Bagi praktisi dan perencana pembangunan, temuan ini dapat dijadikan dasar dalam merancang program pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan, sementara bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk mengembangkan penelitian dengan memasukkan variabel ekonomi dan sosial lainnya, seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, dan ketimpangan pendapatan, guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai determinan kemiskinan di tingkat regional.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, R. A., Fauzan, M., Arsyad, A. A. H. J., & Barki, K. (2023). Implementasi pendekatan community empowerment untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pembangunan ekonomi berbasis potensi daerah. *Journal of Scientech Research and Development*, 5(1), 65–76.
- Aulia, N. & Asiyah, B.N. (2022). Pengaruh jumlah penduduk, indeks pembangunan manusia, produk domestik regional bruto, dan pengangguran terhadap kemiskinan di Jawa Timur, *Jurnal Manajemen*, 14(4), pp. 739–746.
- Bangun, W., Calista, C., Br Ginting, A. A., & Simanjuntak, B. (2024). Pembangunan sumber daya manusia: upaya meningkatkan pembangunan ekonomi. *Journal of Syntax Literate*, 9(7).
- Dewi, N. A., Astuti, T. K., Pandega, S. A., Kusuma, D. P., Huda, R. A., & Daryono, A. A. A.

- (2025). Analisis spasial faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah dengan pendekatan OLS dan GWR. *Al-Iqtisodiyah: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Ekonomi Islam*, 1(3), 92–111.
- Ghasemi, A., & Zahediasl, S. (2012). Normality tests for statistical analysis: A guide for non-statisticians. *International Journal of Endocrinology and Metabolism*, 10(2), 486–489. <https://doi.org/10.5812/ijem.3505>
- Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2009). *Basic econometrics* (5th ed.). New York, NY: McGraw-Hill/Irwin.
- Hakim, M. L. (2024). Dinamika kemiskinan dan efektivitas program pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). *Pangripta Sembada: Jurnal Pembangunan Daerah*
- Hasibuan, L.S. (2023). Analisis pengaruh IPM, inflasi, pertumbuhan ekonomi terhadap pengangguran dan kemiskinan di Indonesia', *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora*, 8(1), pp. 53–60.
- Izzah, C. I., & Hendarti, I. M. (2021). Analisis pengaruh tenaga kerja, tingkat upah, dan PDRB terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Kajian Pendidikan Ekonomi dan Ilmu Ekonomi*, 2, 99–106.
- Lestari, I.T. & Imaningsih, N. (2022). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan, *Jurnal Manajemen*, 14(4), 739–746.
- Maharani, C., Ningrum, D. A., Fatmawati, A. E., & Fadilla, A. (2024). Dampak kemiskinan terhadap kualitas pendidikan anak di Indonesia: rekomendasi kebijakan yang efektif. *Journal of Macroeconomics and Social Development*, 1(3), 1–10.
- Munaa, N. (2025). Faktor-faktor yang mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Kalimantan Timur (Tahun 2017–2023). *Doctoral dissertation*, Universitas Islam Indonesia.
- Pellu, A. (2024). Peningkatan akses keuangan: mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif. *Currency (Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah)*, 2(2), 279–295.
- Sari, Y. A. (2021). Pengaruh upah minimum, tingkat pengangguran terbuka, dan jumlah penduduk terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah. *Equilibrium*, 10(2), 121–130.
- Susanto, A. (2025). Pembangunan berorientasi manusia: suatu analisis terhadap kecenderungan dalam pembangunan nasional. *Jurnal Ilmiah M-Progress*, 15(1), 140–153.
- Tirta, B. W., & Putri, R. N. H. (2025). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, tingkat pengangguran terbuka, dan Produk Domestik Regional Bruto terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Timur. *Jurnal Bina Bangsa Ekonomika*, 18(2), 1500–1510.